

RENCANA KERJA TAHUN 2023



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN GORONTALO**



BUPATI GORONTALO
PROVINSI GORONTALO
KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO
NOMOR : 491 /20/VIII/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN GORONTALO TAHUN 2023

BUPATI GORONTALO,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan pasal 125 huruf (a) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah meliputi penyusunan rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah;
- b. bahwa untuk lancarnya penyusunan rancangan awal rencana kerja sebagaimana pada huruf a, maka perlu dibentuk tim yang bertugas untuk itu;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Tahun 2023;






- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1979 tentang Pemindahan Ibukota Kabupaten Daerah Tingkat II Gorontalo dari Isimu ke Limboto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3147);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara

KABAG HUKUM	SKPD	ISJ	SENDA	WABUP
<i>[Signature]</i>				

- Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pctunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2019 Nomor 4);

KABUP GORONTALO	SKPD	AS 3	SEKDA	WASUP

- Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pctunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tcknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2019 Nomor 4);

KAB. GORONTALO	SKPD	AS 3	SEKDA	YASUP
				

- Memperhatikan :
1. Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 3 Tahun 2005 tentang Tugas dan Wewenang Bupati dan Wakil Bupati serta Pejabat Perangkat Daerah dalam Melaksanakan Tugas Teknis Sehari-hari (Lembaran Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2005 Nomor 3, Seri E), sebagaimana telah diubah untuk ketiga kalinya dengan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 26 Tahun 2012 (Berita Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2012 Nomor 26);
 2. Telaahan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Nomor 800/Kominfo/492 tanggal 06 Juni 2022 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Tahun 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Tahun 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :
- a. menyusun Dokumen Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Tahun 2023 yang meliputi
 - b. Rancangan Awal, Rancangan dan Rancangan Akhir Renja;
 - c. menyusun Dokumen Perubahan Rencana Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Tahun 2023 yang meliputi Rancangan Perubahan Renja dan Rancangan Akhir Perubahan Renja;
 - d. menyiapkan bahan dan data penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

KABAG HUKUM	SKPD	AS 3	SEKDA	WABUP
				

- e. melakukan Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja dan capaian sasaran rencana strategis sampai dengan tahun berjalan;
- f. menyusun Program dan Kegiatan dengan berpedoman pada Renstra;
- g. mengidentifikasi, mengumpulkan dan mengelola data sekunder yang diperlukan untuk menyusun Rencana Kerja;
- h. membuat kesimpulan tentang faktor keberhasilan suatu organisasi dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang; dan
- i. merumuskan tantangan, ancaman dan kekuatan serta peluang keberhasilan pelaksanaan tugas SKPD.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Limboto
pada tanggal 11-08-2022

BUPATI GORONTALO, 

NELSON POMALINGO

Tembusan:

1. Ketua DPRD Kabupaten Gorontalo.
2. Inspektur Kabupaten Gorontalo.
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Kabupaten Gorontalo.
4. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
5. Araip.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI GORONTALO

NOMOR : 491

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA GORONTALO TAHUN 2023

**NAMA-NAMA TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA KABUPATEN GORONTALO**

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GORONTALO	KETUA	
2	SEKERTARIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GORONTALO	SEKRETARIS	
3	KEPALA BIDANG HUBUNGAN MASYARAKAT DAN INFORMASI KOMUNIKASI PUBLIK	ANGGOTA	
4	KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMASI	ANGGOTA	
5	KEPALA BIDANG STATISTIK DAN PERSANDIAN	ANGGOTA	
6	KEPALA SUB. BAGIAN PERANCANAAN DAN KEUANGAN	ANGGOTA	
7	KEPALA SUB. BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN	ANGGOTA	

BUPATI GORONTALO, &

NELSON POMALINGO



KATA PENGANTAR

Kami panjatkan syukur Alhamdulillah atas karunia Allah SWT yang telah memberikan kami kemudahan sehingga dapat menyelesaikan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gorontalo Tahun 2023.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gorontalo Tahun 2023 mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Gorontalo Tahun 2023. Oleh karena itu penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Komunikasi Dan Informatika Tahun 2023 dapat dikerjakan dengan fokus melalui pengkajian terlebih dahulu.

Kepada semua pihak yang terlibat dalam proses penyusunan Rencana Kerja (RENJA) 2023 Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Gorontalo baik dalam bentuk kontribusi data maupun bentuk kontribusi lainnya kami ucapkan terima kasih.

Limboto, 2022

Kepala Dinas



Dr. SUMANTI MAKU, M.Si

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19700815 199203 1 009



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1	Latar Belakang	3
1.2	Landasan Hukum	4
1.3	Maksud Dan Tujuan.....	5
1.4	Sistimatika Penulisan	5

BABA II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN

2.1	Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu Dan Capaian Renstra SKPD	7
2.2	Analisis Kinerja Pelayanan SKPD.....	23
2.3	Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi SKPD.....	25
2.4	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5	Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	35

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1	Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional.....	37
3.2	Tujuan Dan Sasaran Renja SKPD.....	38
3.3	Program dan Kegiatan	39

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA..... 43

BAB V PENUTUP



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh mendorong partisipasi masyarakat. Renja SKPD sebagai acuan permulaan bagi SKPD untuk mengalokasikan program dan kegiatan ke dalam KUA dan PPAS dan perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) pada tahun 2023.

Renja SKPD menjadi salah satu instrument untuk evaluasi pelaksanaan program/kegiatan instansi melalui evaluasi Renja untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai titik awal dari pelaksanaan Tahun ke-2 dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2021-2026. Renja merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara substansial adalah penerjemahan dari visi, misi dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) SKPD. Dalam pasal 5 UU No. 25 tahun 2004 menyatakan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) daerah merupakan penjabaran visi, misi dan program kepala daerah yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dengan memperhatikan RPJMD Nasional dan Provinsi. RPJMD daerah tersebut memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum dan program satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dalam bentuk kerangka anggaran dan kerangka regulasi yang bersifat indikatif.



1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo disusun berdasarkan :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang – undang Dasar 1945
3. Landasan operasional :
 - Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
 - Undang – undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan keuangan Daerah.
 - Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 67 Tahun 2011 sebagai perubahan dari Permendagri Nomor 15 tahun 2008, tentang Tahapan Pelaksanaan PUG mulai dari Perencanaan, Penganggaran, Pelaksanaan, sampai dengan Monitoring dan Evaluasi.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD, serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.
 - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.



- Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo
- Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2021-2026.
- Peraturan Bupati Kabupaten Gorontalo Nomor 48 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika.
- Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 19 Tahun 2022, Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Tahun 2023

1.3 Maksud dan Tujuan

Sebagai pedoman Draft perencanaan kinerja SKPD tahun kedepan (2023) sedangkan tujuan penyusunan Rancangan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo adalah Mengimplementasikan program – program RPJMD sehingga dapat mencapai visi pemerintah Kabupaten Gorontalo sebagai akselerasi pencapaian visi Kabupaten Gorontalo.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana kerja SKPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut :

Bab I. Pendahuluan

Terdiri atas latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja SKPD Tahun Berjalan.

Berisi evaluasi pelaksanaan rencana kerja SKPD tahun lalu dan capaian Renstra SKPD, Analisis kinerja pelayanan SKPD, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD, Review terhadap rancangan awal RKPD, penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III. Tujuan, Sasaran, Program, Dan Kegiatan

Berisi uraian tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Rencana Kerja SKPD, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2023.



Bab IV. Penutup

Penutup, mengemukakan catatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan, kaidah yang mendasari, maupun bila ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan serta rencana tindak lanjut yang akan dibuat.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN BERJALAN

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo pada tahun 2021 telah melaksanakan 4 Program dan 5 kegiatan prioritas yakni sebagai berikut:

➤ **Program Pengelolaan Informasi Komunikasi Publik**

Program ini merupakan penunjang langsung kinerja sasaran strategis organisasi yang terdiri dari 1 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 2.723.722.450 dengan capaian realisasi Rp. 2.567.805.200 atau 94,28%.

➤ **Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**

Program ini merupakan penunjang langsung kinerja sasaran strategis organisasi yang terdiri dari 2 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 338.898.000 capaian realisasi Rp. 332.474.100 atau 97,52%.

➤ **Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral**

Program ini merupakan penunjang langsung kinerja sasaran strategis organisasi yang terdiri dari 1 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 248.674.000 capaian realisasi Rp. 247.732.060 atau 99,62%.

➤ **Program Penyelenggaraan Persandian**

Program ini merupakan penunjang langsung kinerja sasaran strategis organisasi yang terdiri dari 1 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 15.330.000 capaian realisasi Rp. 15.300.000 atau 99,80%.

Secara keseluruhan pelaksanaan rencana kerja 2021 dengan ruang lingkup kegiatan dapat dilihat dalam tabel berikut:



Tabel Rekapitulasi Keuangan dan Realisasi Berdasarkan Program/Kegiatan

No.	Urusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Alokasi Biaya (Rp)		
		Anggaran	Realisasi	%
1.	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	3.745.142.581	3.694.590.546	98,65
1.1	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.601.831.779	2.580.054.019	99,16
1.1.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	2.363.811.779	2.342.574.019	99,10
1.1.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	238.020.000	237.480.000	99,77
1.2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	667.214.302	657.543.625	98,55
1.2.1	Penyediaan Perlatan dan Perlengkapan Kantor	3.354.243	1.977.500	58,96
1.2.2	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	114.558.360	111.154.500	97,03
1.2.3	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	155.856.575	151.679.900	97,82
1.2.4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	393.445.124	392.731.725	99,82
1.3	Penyediaan Jasa penunjang Urusan Pemerintah Daerah	171.420.000	162.510.903	94,80
1.3.1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	145.000.000	144.610.903	99,73
1.3.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	26.420.000	17.900.000	67,75
1.4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	304.676.500	294.481.999	94,80
1.4.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.150.000	38.115.801	99,91
1.4.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.569.000	23.493.698	99,68
1.4.3	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	23.569.000	23.493.698	99,68
1.4.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	242.957.500	232.872.500	95,85
2.	Program pengelolaan informasi publik	2.723.722.450	2.567.805.200	94,28
2.1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah	2.723.722.450	2.567.805.200	94,28



	Kabupaten/Kota			
2.1.1	<i>Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Kamunikasi Publik</i>	116.202.125	75.580.000	65,90
2.1.2	<i>Pengelolaan Media Komunikasi Publik</i>	863.738.713	763.520.000	88,40
2.1.3	<i>Layanan Hubungan Media</i>	1.640.281.612	1.624.205.200	99,02
2.1.4	<i>Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas</i>	103.500.000	103.500.000	99,02
3.	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika	338.898.000	332.474.100	98.10
3.1	<i>Pengelolaan nama domain yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan sub domain dilingkup Pemerintah Kabupaten / Kota</i>	231.874.000	226.123.300	94,28
3.1.1	<i>Penata Laksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	14.850.000	9.900.000	66,67
3.1.2	<i>Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah</i>	110.000.000	109.872.500	99,88
3.2	<i>Pengelolaan e-government di Lingkup Pemerintah Daerah</i>	107.024.000	106.350.800	99,37
3.2.1	<i>Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik</i>	107.024.000	106.350.800	99,37
4.	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	248.674.000	247.732.060	99,62
4.1	<i>penyelenggaraan statistik sektoral dilingkup daerah kabupaten / kota</i>	248.674.000	247.732.060	99,62
4.1.1	<i>Koordinasi dan sinkronisasi pengumpulan, pengolahan, analisis dan desiminasi data statistik sektoral</i>	104.280.000	104.280.000	100,00
4.1.2	<i>peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam peningkatan mutu statistik daerah yang terintegrasi</i>	54.552.000	53.988.060	98,97
4.1.3	<i>Membangun metadata statistik sectoral</i>	89.842.000	89.988.000	99,58
5.	Program penyelenggaraan persandian untunk pengamanan informasi	15.330.000	15.300.000	99,80
5.1	<i>Penyelenggaraan Persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah kab/kota</i>	15.330.000	15.300.000	99,80



5.1.1	<i>Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>15.330.000</i>	<i>15.300.000</i>	<i>99,80</i>
JUMLAH		6.964.743.031	6.751.551.106	96,94



TC.29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN
PENCAPAIAN RENSTRA S/D TAHUN 2022 TAHUN BERJALAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GORONTALO

Kode	Urusan Bidang Urusan / Program / Kegiatan	Indikator kinerja Program (Outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra tahun 2021-2026)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2020 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2021)			Target Program dan Kegiatan (Renja Tahun 2022) (n-1)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra s/d Tahun Berjalan	
					Target Renja Tahun 2021 (n-2)	Realisasi Renja tahun 2021 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun Berjalan (tahun 2022) (n-1)	Tingkat Capaian Realisasi target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	100 %	- -	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Ketercapaian Perencanaan, penganggaran , dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100 %	- -	0 %	- 0	- %	100 %	100 %	100 %
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Waktu penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	25 Dok	- -	0 0	0 0	- 0	5 Dok	5 Bulan	20 %
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100 %	0 0	100 %	100 %	100 %	100 %	200 %	40 %
	- Peyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Waktu Peyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	72 Bulan	- -	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	24 Bulan	33 %
	- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	72 Bulan	- -	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	24 Bulan	33 %
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60 Bulan	- -	0 0	0 0	0 0	12 Bulan	12 Bulan	20 %
	- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	60 Bulan	- -	0 0	0 0	0 0	12 Bulan	12 Bulan	20 %



Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik daerah sebagai Penunjang urusan pemerintah Daerah	100 %	0 0	100 %	100 %	100 %	100 %	200 %	40 %
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah dan Jenis Kendaraan dinas Jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	1 Unit	- -	1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	2 Unit	200 %
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	5 Unit	- -	5 Unit	5 Unit	100 %	1 Unit	6 Unit	120 %
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	- -	1 Unit	1 Unit	100 %	1 Unit	2 Unit	200 %
Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	0 0	100 %	100 %	100 %	100 %	200 %	40 %
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	72 Bulan	- -	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	24 Bulan	33 %
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	72 Bulan	- -	12 Bulan	12 Bulan	100 %	12 Bulan	24 Bulan	33 %
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100 %	0 0	100 %	73 %	73 %	100 %	173 %	40 %
- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	72 Bulan	- -	0 0	0 0	- 0	12 Bulan	12 Bulan	17 %
- Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Bahan/Bahan Material yang disediakan	5 Jenis	- -	0 0	0 0	- 0	5 Jenis	5 Jenis	100 %
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah dan Jenis Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Jenis	- -	2 Jenis	2 Jenis	100 %	2 Jenis	4 Jenis	200 %



- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan Jenis barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Jenis	-	-	3 Jenis	3 Jenis	100 %	3 Jenis	6 Jenis	200 %
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah dan Jenis barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Jenis	-	-	3 Jenis	3 Jenis	100 %	3 Jenis	6 Jenis	200 %
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	125 Jenis	-	-	125 Jenis	90 Jenis	72 %	125 Jenis	215 Jenis	172 %
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	300 Kali	-	-	50 Kali	50 Kali	100 %	50 Kali	100 Kali	33 %
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	110 Unit	0 0	15 Unit	0 0	- %	15 Unit	15 %	40 %	
- Pengadaan Mebel	Jumlah unit pengadaan mebel	25 Unit	-	-	0 0	0 0	- 0	5 Unit	5 Unit	20 %
- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	85 Unit	-	-	0 0	0 0	- 0	10 Unit	10 Unit	12 %
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100 %	0 0	100 %	0 0	- %	100 %	100 %	40 %	
- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut perlengkapannya	282 Pasang	-	-	47 Pasang	0 0	- %	47 Pasang	47 Pasang	17 %
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	Indeks Persepsi Publik terhadap pemerintah Daerah	75 %	0 0	50 %	15 %	31 %	55 %	70 %	94 %	
Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	75 %	0 0	75 %	23 %	31 %	75 %	98 %	40 %	
- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan strategi komunikasi	100 Konten	0 0	50 Konten	50 Konten	100 %	100 Konten	150 Konten	150 %	
- Pengelolaan media komunikasi publik	Jumlah layanan media informasi dan Komunikasi publik yang dilaksanakan	25 Media	-	-	22 Media	22 Media	100 %	25 Media	47 Media	188 %



- Pelayanan Informasi Publik	Jumlah pengaduan masyarakat yang diverifikasi	50 Pengaduan	0 0	50 Pengaduan	20 Pengaduan	40 %	50 Pengaduan	70 Pengaduan	140 %
- Layanan Hubungan Media	Jumlah Siaran Pers yang dilakukan	25 Kali	0 0	20 Kali	20 Kali	100 %	25 Kali	45 Kali	180 %
- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan	19 Kecamatan	- -	19 Kecamatan	19 Kecamatan	100 %	19 Kecamatan	38 Kecamatan	200 %
Program Aplikasi Informatika	Persentase penerapan SPBE di Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo	74,67 %	- -	50 %	15 %	31 %	52,94 %	68 %	91 %
Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah domain pemerintah pusat dan sub domain pemerintah daerah yang dikelola dan terkoneksi dalam jaringan intra pemerintah daerah	211 Domain /Sub Domain	0 0	40 Sub Domain	10 Sub Domain	25 %	42 Sub Domain	52 Sub Domain	40 %
- Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah domain / sub domain pemerintah daerah yang dikelola	Domain/ 45 Sub Domain	- -	Doamain/ 41 Sub Domain	Domain/S 10 ub Domain	24 %	Domain/S 42 ub DDomain	Domain/S 52 ub Domain	116 %
- Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah daerah	Jumlah OPD Yang Terintegrasi Jaringan Intra Pemerintah daerah	24 OPD	24 OPD	22 Media	22 Media	100 %	25 Media	71 Media	296 %
Pengelolaan e-government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan publik dan administrasi yang terintegrasi	13 Aplikasi /Layanan Publik	0 0	8 Layanan Publik	4 Aplikasi/ Layanan Publik	50 %	9 Aplikasi/ Layanan Publik	13 Aplikasi/ Layanan Publik	100 %
Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah dan Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	Aplikasi/ 13 Layanan Publik	- -	Aplikasi/L 8 ayanan Publik	Aplikasi/L 4 ayanan Publik	50 %	Aplikasi/L 9 ayanan Publik	Aplikasi/L 13 ayanan Publik	100 %



	Program penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase tersedianya sistem pengelolaan statistik sektoral	85,29 %	0 0	14,71 %	10,71 %	73 %	17,65 %	28 %	33 %
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	- Persentase terbangunnya satu data daerah.	50 %	0 0	50 %	23 %	47 %	75 %	98 %	197 %
		- Persentase Pemanfaatan data untuk pembangunan daerah	10 %	0 0	10 %	5 %	37 %	10 %	15 %	150
	- Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan , Pengolahan ,Analisis dan desiminasi data statistik sektoral	Jumlah Buku Data Potensi Pembangunan	4 Dok	0 0	4 Dok	3 Dok	75 %	4 Dok	7 Dok	175 %
	- Peningkatan kapasitas SDM Pemda dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang terintegrasi	Jumlah Pelatihan/Bimtek kapasitas SDM Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo	2 Kali	0 0	2 Kali	2 Kali	100 %	2 Kali	4 Kali	200 %
	- Membangun Metadata Statistik Sektoral	Persentase ketersediaan data statistik	25 %	0 0	25 %	25 %	100 %	25 %	50 %	200 %
	Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi Perangkat Daerah	91,18 %	0 0	8,82 %	8,82 %	100 %	17,65 %	26 %	29 %
	Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Sistem informasi yang bersertifikat Elektronik	91,18 %	0 0	8,82 %	8,82 %	100 %	17,65 %	26 %	29 %
	- Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Surat Elektronik dan Non elektronik yang diamankan	200 Surat	0 0	200 Surat	150 Surat	75 %	200 Surat	350 Surat	175 %
	- Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaksanaan layanan keamanan informasi	12 Kali	0 0	12 Kali	12 Kali	100 %	12 Kali	24 Kali	200 %



1) Realisasi Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran adalah sebagai berikut ;

a. Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi public

- Pengelolaan informasi dan komunikasi public pemerintah daerah kabupaten/kota

Capaian kinerja kegiatan ini hanya 23% dari target 75%, dengan anggaran sebesar Rp. 2.723.722.450, dan realisasi sebesar Rp. 2.567.805.200.-

b. Program Aplikasi dan Informatika

- Pengelolaan nama Domain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah pusat dan sub domain di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota

Capaian kinerja kegiatan ini hanya mencapai 10 Domain/sub Domain dari target sebanyak 40 Domain/Sub Domain, dengan anggaran sebesar Rp. 231.874.000, dan realisasi sebesar Rp. 226.123.300.-

- Pengelolaan e-government di lingkup pemerintah daerah kabupaten/kota

Capaian kinerja kegiatan 4 aplikasi/Layanan Publik dari target 8 aplikasi/layanan public, dengan anggaran sebesar Rp. 107.024.000.- dan realisasi sebesar Rp. 107.024.000.-

c. Program Penyelenggaraan Statistik sectoral

- Penyelenggaraan statistic sectoral dilingkup pemerintah daerah kabupaten/kota

Capaian kinerja kegiatan diantaranya persentase terbangunnya satu data daerah mencapai 23% dari target 50%, persentase pemanfaatan data untuk pembangunan daerah dengan capaian 5% dari target 10%, dengan anggaran sebesar Rp. 248.674.000.- dan realisasi sebesar Rp. 247.732.060.-

d. Program Penunjang urusan pemerintah daerah kabupaten/kota

- Administrasi umum perangkat daerah

Capaian kinerja 73% dari target 100%, dengan anggaran sebesar Rp. 667.214.302,- dan realisasi sebesar Rp. 657.543.625

2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;

a. Program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi

- Penyelenggaraan persandian untuk pengamanan untuk pengamanan informasi pemerintah daerah

Capaian kinerja 100% dari anggaran sebesar Rp. 15.300.000,- dan Relaisasi Sebesar Rp. 15.300.000.-

b. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

- Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah hasil target kinerja 100% dengan anggaran sebesar Rp. 171.420.000 dan realisasi anggaran sebesar Rp. 162.510.903.-

- Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah

Capaian kinerja 100% dari anggaran sebesar Rp. 304.676.500 dengan realisasi anggaran sebesar Rp.294.481.999.-

- Administrasi keuangan perangkat daerah

Capaian kinerja 100% dari anggaran sebesar Rp. 2.601.831.779, dengan realisasi Rp. 2.580.054.019.

3) Faktor-faktor yang menyebabkan tercapainya target kinerja program/kegiatanantara lain :

- Komitmen seluruh jajaran Komunikasi dan Informatika untuk melaksanakan kinerja sesuai dengan rencana kerja yang ditetapkan;
- Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala sebagai bagian dari sistem manajemen;
- Rentang kendali yang sederhana dan tidak berbelit memudahkan untuk pengawasan (kontrol);
- Job discription yang jelas serta pelimpahan wewenang, siapa mengerjakanapa, kapan dan dimana dengan pengawasan oleh atasan langsung.

4) Adapun implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD :

- 1) Terciptanya nilai disiplin dan tanggung jawab yang tinggi di lingkungan pegawai Dinas Komunikasi dan Infromatika ;
- 2) Terbangunnya spirit untuk mempertahankan dan meningkatkan kinerja dalam meraih hasil yang lebih baik dari tahun sebelumnya;
- 3) Perlu adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugas.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo berupaya mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan melalui pencapaian kinerja SKPD. Keberhasilan dan atau kegagalan dalam pelaksanaan program merupakan gambaran kinerja dalam mengemban tugas dan tanggung jawab dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Tingkat capaian kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika selama tahun 2020 diuraikan sebagai berikut:



TC - 30
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN OPD

NO	INDIKATOR	SPM/ STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH				REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
				2021 (thn n-2)	2022 (thn n-1)	2023 (n)	2024 (n+1)	2021 (thn n-2)	2022 (thn n-1)	2023 (n)	2024 (thn n+1)	
1.	Indeks Persepsi Publik terhadap Pemerintah Daerah			50	55	60	65	0	0	60	65	
2.	Persentase Penerapan SPBE di Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo			50,00%	52.94%	58.82%	64.71%	35,29%	31,71%	58.82%	64.71%	
3.	Literasi TIK ASN Pemerintah Daerah			-	30%	33%	35%	0	0	33%	35%	
4.	Persentase tersedianya Sistem Pengelolaan Statistik Sektoral			14,71%	17,65%	20,59%	29,41%	8,82%	9,76%	20,59%	29,41%	
5.	Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah			8,82%	17,65%	23,53%	29,41%	8,82%	7,32%	23,53%	29,41%	



2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD

Dengan kewenangan yang diberikan kepada daerah dalam menentukan pola organisasinya, maka Pemerintah daerah memerlukan dukungan teknis dan wawasan yang luas dalam merumuskan, mendesain dan mengimplementasikan visi dan misi pemerintah daerah kedalam pola organisasi pemerintah daerah, dengan organisasi pemerintah kabupaten merupakan wadah bagi pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintah dan sebagai proses interkasi antara pemerintah institusi daerah lainnya dan dengan masyarakat sebagai pilar-pilar pembangunan daerah.

2.3.1 Tingkat kinerja pelayanan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo

Dinas komunikasi dan Informatika adalah salah satu OPD yang bergerak dibidang pelayanan perluasan informasi, pengembangan dan pemberdayaan TIK, telekomunikasi, statistic dan persandian

Dalam rangka pelayanan kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo pada Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 aparatur Dinas Komunikasi dan Informatika meliputi :

1. Kepala Dinas 1 Orang
2. Sekretaris Dinas 1 Orang
3. Kasubag di secretariat 2 orang
4. Kepala Bidang Teknis 3 Orang
5. Kepala Seksi Teknis 8 orang
6. Fungsional Umum 5 Orang
7. Tenaga Kontrak 25 Orang

2.3.2 Permasalahan dan hambatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika

Adapun Permasalahan dalam pelayanan Perangkat daerah diantaranya

1. Belum optimalnya pengelolaan teknologi informasi seperti website aktif pada masing-masing perangkat daerah
2. Variable pada domain tata Kelola SPBE masih belum optimal
3. Terbatasnya kapasitas SDM pengelola sandi
4. Belum optimalnya penyelenggaraan komunikasi, informasi dan media masa bagi



masyarakat

5. Tingginya resiko kerawan keamanan informasi
6. Belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintah daerah
7. Kurangnya sarana dan prasarana penunjang pengembangan teknologi informasi
8. Belum optimalnya ketersediaan data sectoral secara optimal
9. Belum optimalnya pemanfaatan data sectoral

Sedangkan faktor-faktor penghambat ;

1. Kapasitas , kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi belum optimal
2. Koordinas internal balum optimal
3. Pelaksanaan beban kerja yang tidak sesuai tugas pokok dan fungsi
4. Sarana dan prasarana pendukung kinerja belum memadai
5. Kurangnya integrasi data
6. Kurangnya kapasitas pengelola data sectoral
7. Belum optimal kemudahan akses public terhadap data sectoral

2.3.3 Dampak Terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah

Dampak yang ditimbulkan dalam pencapaian visi dan misi kepala daerah antara lain :

1. Peningkatan kapasitas aparatur perangkat daerah dalam pengelolaan jaringan dan pemanfaatan aplikasi e-government lingkup pemerintah daerah;
2. Peningkatan ketersediaan data statistic sectoral kabupaten Gorontalo

2.3.4 Dampak Terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah

Dalam upaya meningkatkan kinerja pelayanan Dinas Komunikasi dan Informatika, perlu mengetahui dinamika tantangan dan peluang yang ada, guna mempertajam kebijakan pelayanan Dinas Kominfo untuk mendukung pencapaian target dan sasaran RPJMD

1. Tantangan
 - a. Penigkatan kebutuhan pelayanan informasi public yang cepat, tepat, murah dan sederhana



- b. Belum sepenuhnya tercipta citra positif terhadap organisasi perangkat daerah di Kabupaten Gorontalo khususnya dalam bidang akuntabilitas dan integritas aparatur serta bidang pelayanan public;
 - c. Belum kuatnya jejaring informasi antar OPD Kabupaten Gorontalo khususnya dalam memberikan counter terhadap pemberitaan negative;
 - d. Pesatnya perkembangan TIK
 - e. Ketersediaan infrastruktur TIK yang belum merata di kabupaten Gorontalo
 - f. Terbatasnya pemahaman aparatur dan masyarakat kabupaten Gorontalo terhadap TIK dan statistic sectoral
 - g. Data statistic sectoral yang terintegrasi melalui satu data Gorontalo
 - h. Peningkatan kapasitas kelembagaan pemerintah kabupaten Gorontalo melalui pemanfaatan persandian dan peningkatan kualitas keamanan informasi;
 - i. Peningkatan kapasitas SDM
2. Peluang
- a. INPRES No.3 Th.2003 tentang Kebijakan dan strategi Nasional Pengembangan e-Government;
 - b. UU NO.11 Th.2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE);
 - c. UU No.14 Th.2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP);
 - d. Kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan public kabupaten Gorontalo berbasis elektronik;
 - e. Kebutuhan pengembangan muatan e-Government sesuai karakteristik daerah di kabupaten gorontalo;
 - f. Kesadaran masyarakat kabupaten Gorontalo akan pentingnya statistic sectoral, informasi dan komunikasi
 - g. Kebutuhan pengembangan TIK dalam mewujudkan Digitalisasi Tata Kelola Pemerintah Provinsi Gorontalo
 - h. Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi sebagai peningkatan pembangunan kabupaten Gorontalo
 - i. Peningkatan kebutuhan pelayanan informasi public yang cepat, tepat, murah dan sederhana



2.3.5 Formulasi Isu-isu penting

isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam kinerja dan pelayanan karena dampaknya yang signifikan di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka Panjang

isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka Panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat dalam meningkatkan pelayanan OPD, maka dapat ditetapkan isu strategis Dinas KOMunikasi dan Informatika kabupaten Gorontalo sebagai berikut :

1. Fasilitas teknologi informasi dan komunikasi dalam mendukung pelayanan public belum optimal;
2. Integrasi aplikasi layanan public, tata Kelola dan ekosistem e-government belum optimal
3. Kurangnya pemahaman, kesadaran dan tata Kelola serta infrastruktur terkait persandian dan keamanan informasi
4. Rendahnya integrasi dan kualitas data statistic sectoral
5. Penyebarluasan informasi dan komunikasi public belum optimal
6. Permasalahan actual pada tahun 2020 yang berkembang dimasyarakat mengenai Pandemi covid-19 yang melanda Indonesia bahkan Dunia, perlu pengfangan dan upaya penyelesaian yang diselaraskan dengan visi dan misi kepala daerah yang kemudian direalisasikan dalam bentuk usulan program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja (Renja) Tahun 2023 pada masing-masing OPD di kabupaten Gorontalo. Pandemi covid-19 yang terjadi di Indonesia sejak bulan maret tahun 202 memberikan dampak yang tidak hanya pada bidang Kesehatan tetapi juga bidang-bidang lain yang termasuk ekonomi dan social budaya masyarakat. Wabah covid-19 yang belum diketahui kapan berakhirnya menyebabkan ketidakpastian dan perlu antisipasi baik dari sisi pencegahan maupun penanganan



dampak pandemic covid-19 ini.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Hasil review Rancangan Awal RKPD terdapat tantangan dan kemauan yang telah dicapai hingga tahun 2022. Peningkatan hasil-hasil pembangunan yang memberikan manfaat kepada masyarakat perlu secara terus menerus diupayakan melalui perencanaan, implementasi serta pengawasan pembangunan sesuai dengan maksud dan tujuan otonomi daerah, dengan menciptakan program program di daerah yang bersifat jangka panjang sehingga peningkatan kualitas terhadap masyarakat diharapkan lebih terpadu dan terarah.

Bila ditinjau dari rancangan awal RKPD tahun 2023 maka total pembiayaan sebesar Rp. 5.700.745.656 hal ini mengindikasikan kebutuhan dalam pengembangan infrastruktur teknologi informasi belum dapat terpenuhi. Namun demikian upaya untuk memaksimalkan potensi yang baik dari aspek sumber daya manusia mupun lainnya. Berikut tabel review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2023 Dinas komunikasi dan Informatika :



TC. 31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2023
KABUPATEN GORONTALO

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	3.387.369.459,00	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	4.417.725.678,00	
1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	5.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Persentase Ketercapaian Perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	21.400.000	
	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Limboto	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	5.000.000	- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Limboto	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	4 dokumen	21.400.000	
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	2.729.910.359	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	3.334.927.527	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Limboto	Waktu Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	12 Bulan	2.604.910.359,00	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Limboto	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	25 orang/Bulan	3.105.967.527,00	
	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Limboto	Waktu Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Bulan	125.000.000,00	- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Limboto	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	400 Dokumen	228.960.000,00	
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	50.000.000					-	
	- Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Limboto	Jumlah Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut perlengkapannya	49 Orang	50.000.000,00						
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	254.309.100	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	672.638.151	
	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Limboto	waktu penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	12 bulan	6.000.000,00	- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Limboto	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	5.291.250,00	
	- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Limboto	Jumlah dan Jenis Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	125 Jenis	6.000.000,00					-	
	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Limboto	Jumlah dan Jenis Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2 Jenis	50.000.000,00	- Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Limboto	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2 Paket	55.700.000,00	



-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Limboto	Jumlah dan Jenis barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Jenis	50.000.000,00	-	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Limboto	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	329.146.901,00	
-	Penyediaan Bahan/Material	Limboto	Jumlah Bahan/Bahan Material yang disediakan	5 Jenis	10.000.000,00	-					-	
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Limboto	Jumlah Penyelenggaraan Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50 Kali	132.309.100,00	-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Limboto	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	250 Laporan	282.500.000,00	
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Jumlah Unit pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	15 Unit	15.000.000						-	
-	Pengadaan Mebel	Limboto	Jumlah unit pengadaan mebel	5 Unit	5.000.000,00	-					-	
-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Limboto	Jumlah unit pengadaan peralatan dan mesin lainnya	10 Unit	10.000.000,00	-					-	
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100%	170.000.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Cakupan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah daerah	100%	263.260.000	
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Limboto	Waktu Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12 Bulan	130.000.000,00	-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Limboto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	168.960.000,00	
-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Limboto	Waktu Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	12 Bulan	20.000.000,00	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Limboto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	3 Laporan	18.300.000,00	
-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Limboto	waktu penyediaan jasa pelayanan umum kantor	12 Bulan	20.000.000,00	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Limboto	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	76.000.000,00	
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Cakupan Pemeliharaan Barang Milik daerah sebagai Penunjang urusan pemerintah Daerah	100%	163.150.000,00	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Cakupan Pemeliharaan Barang Milik daerah sebagai Penunjang urusan pemerintah Daerah	100%	125.500.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Limboto	Jumlah dan Jenis Kendaraan dinas Jabatan yang disediakan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	1 unit	38.150.000,00		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Limboto	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 unit	40.650.000,00	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Limboto	Jumlah dan Jenis Kendaraan Dinas Operasional atau lapangan yang disediakan jasa pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak	5 Unit	25.000.000,00		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Limboto	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	1 Unit	35.170.000,00	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Limboto	Jumlah Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	1 Unit	100.000.000,00		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Limboto	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	49.680.000,00	



B	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Indeks persepsi publik terhadap pemerintah daerah	60 (B)	1.450.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Indeks persepsi publik terhadap pemerintah daerah	60 (B)	811.162.320,00
1	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	75,00%	1.450.000.000,00	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	75,00%	811.162.320,00
	- Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Kab Gtlo	Jumlah Konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah yang sesuai dengan strategi komunikasi	100 Konten	75.000.000,00	-				-
	- Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab Gtlo	Jumlah layanan media informasi dan komunikasi publik yang dilaksanakan	25 Media	1.200.000.000,00	- Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab Gtlo	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	360 Dokumen	633.000.000,00
	- Layanan Hubungan Media	Kab Gtlo	Jumlah Siaran Pers yang dilakukan	25 Kali	50.000.000,00	- Layanan Hubungan Media	Kab Gtlo	Jumlah Layanan Hubungan Media	25 Layanan	45.612.320,00
	- Pelayanan Informasi Publik	Kab Gtlo	Jumlah pengaduan masyarakat yang diverifikasi	50 Pengaduan	75.000.000,00	- Pelayanan Informasi Publik	Kab Gtlo	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	1 Dokumen	32.700.000,00
	- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kab Gtlo	Jumlah Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan	19 Kecamatan	50.000.000,00	- Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Kab Gtlo	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	19 Dokumen	99.850.000,00
C	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Persentase penerapan SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo	59%	1.125.000.000,00	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Persentase penerapan SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo	59%	322.657.658,00
1	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah domain pemerintah pusat dan sub domain pemerintah daerah yang dikelola dan terkoneksi dalam jaringan intra pemerintah daerah	42 Domain/Sub Domain	850.000.000,00	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah domain pemerintah pusat dan sub domain pemerintah daerah yang dikelola dan terkoneksi dalam jaringan intra pemerintah daerah	42 Domain/Sub Domain	222.522.523,00
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Kab Gtlo	Jumlah domain / sub domain pemerintah daerah yang dikelola	42 Domain/Sub Domain	50.000.000,00					
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab Gtlo	Jumlah OPD Yang Terintegrasi Jaringan Intra Pemerintah daerah	20 OPD	800.000.000,00	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kab Gtlo	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	5 Unit	222.522.523,00



2	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah layanan publik dan administrasi yang terintegrasi	10 OPD	275.000.000,00	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah layanan publik dan administrasi yang terintegrasi	10 OPD	100.135.135,00	
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab Gtlo	jumlah perangkat daerah yang menggunakan layanan pusat data pemerintah dan Jumlah perangkat daerah yang menyimpan data di pusat data pemerintah	10 OPD	275.000.000,00	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Kab Gtlo	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	1 unit	100.135.135,00	
D	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase tersedianya sistem pengelolaan statistik sektoral	20,59%	175.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Persentase tersedianya sistem pengelolaan statistik sektoral	20,59%	125.200.000,00	
1	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase terbangunnya satu data daerah	50%	175.000.000,00	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Persentase terbangunnya satu data daerah	50%	125.200.000,00	
	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Kab Gtlo	Jumlah Buku Data Potensi Pembangunan	1 Dokumen	50.000.000,00					-	
	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kab Gtlo	Jumlah Pelatihan/Bimtekkapasitas SDM Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo	2 Kali	50.000.000,00	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kab Gtlo	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	243 Orang	75.200.000,00	
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab Gtlo	Persentase ketersediaan data statistik	25%	75.000.000,00	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Kab Gtlo	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	1 Dokumen	50.000.000,00	
E	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	23,53%	50.000.000,00	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	23,53%	24.000.000,00	
1	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Jumlah Sistem informasi yang bersertifikat Elektronik	23,53%	50.000.000,00	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Persentase Jumlah Sistem informasi yang bersertifikat Elektronik	23,53%	24.000.000,00	
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab Gtlo	Jumlah Surat Elektronik dan Non elektronik yang diamankan	200 Surat	25.000.000,00	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab Gtlo	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	2 Laporan	24.000.000,00	
	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab Gtlo	Jumlah Pelaksanaan layanan keamanan informasi	12 Kali	25.000.000,00					-	
JUMLAH					6.187.369.459	JUMLAH					5.700.745.656





2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Prosedur dalam usulan program dan kegiatan dapat dilaksanakan dengan menganalisa kebutuhan masyarakat baik yang secara langsung disampaikan oleh masyarakat melalui Lembaga/organisasi maupun melalui OPD. Dalam perencanaan pembangunan, segala aspek harus diperhatikan termasuk salah satunya adalah usulan dari lapisan masyarakat agar pembangunan diharapkan dapat berjalan sesuai sasaran tepat guna.

Musrenbang diperkenalkan sebagai upaya mengganti sistem sentralistik dan top-down. Masyarakat di tingkat lokal dan pemerintah punya tanggung jawab yang sama berat dalam membangun wilayahnya. Masyarakat seharusnya berpartisipasi karena ini merupakan kesempatan untuk secara bersama menentukan masa depan wilayah. Masyarakat juga harus memastikan pembangunan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan kebutuhan.

Partisipasi masyarakat yang berkesesuaian dengan dengan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika belum ada, namun berdasarkan hasil analisa terhadap isu-isu strategis dan janji Bupati dan Wakil Bupati Gorontalo selama masa kampanye pemilihan Kepala Daerah maka ditetapkan 6 (enam) prioritas pembangunan kabupaten Gorontalo, yakni : manusia tangguh dan produktif; tatakelola pemerintahan bersih, dinamis dan terpercaya, ketahanan ekonomi dan pertumbuhan berkualitas, meningkatkan infrastruktur wilayah membuka konektivitas, pembangunan berbasis kependudukan & adaptasi perubahan iklim, Pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo, tidak terdapat usulan Program dan kegiatan daripada pemangku kepentingan.

TC. 32						
USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PEMANGKU KEPENTINGAN						
TAHUN 2023						
NO	PROGRAM/KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	JUMLAH ANGGARAN	CAT.



BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Telaah terhadap kebijakan nasional yaitu , Pemerataan Infrastruktur TIK, percepatan transformasi digital, dan pengelolaan komunikasi public. Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Presiden Republik Indonesia, Kemenkominfo memetakan arah pembangunan nasional kedalam (3) tiga tujuan utama kemenkominfo sebagai focus pada pembangunan bidang komunikasi dan informatika sebagai berikut :

1. Meningkatkan penyediaan dan pemerataan infrastruktur TIK di seluruh Indoensia
2. Mendorong percepatan transformasi digital di 3 aspek, bisnis, masyarakat, dan pemerintahan, yang ditunjang oleh sumber daya manusia yang memiliki kompetensi digital, dan
3. Memperkuat transparansi informasi public dan pengelolaan komunikasi public.

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional, sistem perencanaan pembangunan provinsi serta sistem perencanaan pembangunan Kabupaten Gorontalo. Oleh karena itu, Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Infromatika dengan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gorontalo, sehingga dapat dikatakan bahwa Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika bersinergi dengan dokumen perencanaan lain, baik Nasional, seperti RPJP Nasional, RPJM Nasional, RKP Nasional; maupun di tingkat Provinsi, dan RPJMD Kabupaten Gorontalo 2021-2026.



Arah kebijakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan penerapan e-Government atau sistem Pemerintahan Bebas Elektronik (SPBE) dilingkungan pemerintha kabupaten gorontalo
2. Meningkatkan keamanan sistem pemerintahan Bebas Elektronik (SPBE) dilingkungan pemerintah kabupaten gorontalo
3. Meningkatkan penyebaran informasi public kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah
4. Meningkatkan ketrselenggaraan statistic sectoral kabupaten Gorontalo melalui pembaruan data statistic sektoral

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Penyusunan Renja Dinas Komunikasi dan Infomatika Kabupten Gorontalo Tahun 2023 adalah sebagai bagian dari RPJMD tahun 2021-2026. Adapun yang menjadi visi Kepala daerrah yang menjadi dasar dalam pengembangan perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Gorontalo adalah **"Gorontalo Gemiloang dan Mandiri Mewujudkan Masyarakat Madani"**

Dalam mewujudkan visi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan kabupaten Gorontalo sebagai berikut :

1. Manusia Tangguh dan Produktif
2. Tatakelola pemerintah bersih, dinamis dan terpercaya
3. Ketahanan ekonomi dan pertumbuhan berkualitas
4. Meningkatkan infrastruktur wilayah membuka konektifitas
5. Pembagunan berbasis kependudukan dan adaptasi perubahan iklim

Review rencana kerja ini disusun dengan tujuan pemerintahan yang adptif terhadap perubahan. Sehingga dalam penyelenggaraan tugas dan pokok dan fungsinya akan mewujudkan suatu sistem yang terpadu dan saling mendukung dengan sector lainnya.

Sasaran yang ingin dicapai oleh dinas komunikasi dan informatika kabupaten Gorontalo adalah :

1. Kebijakan pembangunan yang adptif terhadap perubahan



Tabel 3.0
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Gorontalo

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran pada Tahun 2023
Pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan	Kebijakan Pembangunan yang adaptif terhadap perubahan	<ul style="list-style-type: none">- Indeks Persepsi Publik terhadap Pemerintah Daerah- Persentase Penerapan SPBE di Pemerintah daerah Kabupaten Gorontalo- Literasi TIK ASN Pemerintah Daerah- Persentase tersedianya Sistem Pengelolaan Statistik Sektoral- Persentase Perangkat daerah yang telah menggunakan Sandi dalam Komunikasi Perangkat Daerah	55 (B) 52,94% 30% 17,65% 17,65%



3.3 Program dan Kegiatan

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

a. Pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Memasuki tahap baru pemerintahan Kabupaten Gorontalo dan RPJMD 2021 – 2026, visi dan misi Kepala Daerah tentunya bermuara pada kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Terdapat beberapa permasalahan maupun tantangan dalam mewujudkan hal ini, antara lain masih adanya pengangguran dan masyarakat miskin, tingkat pendapatan yang masih tergolong rendah sehingga berakibat pada rendahnya daya beli masyarakat, fasilitas infrastruktur yang masih belum memadai dan masih rendahnya kontribusi dunia usaha terhadap peningkatan/pertumbuhan perekonomian daerah. Kemiskinan sebagai salah satu tantangan dalam mewujudkan masyarakat yang sejahtera merupakan gambaran suatu kondisi masyarakat yang serba tidak berkecukupan menyangkut berbagai hal pemenuhan kebutuhan hidup.

b. Pengentasan kemiskinan

Arah kebijakan umum untuk memantapkan pembangunan ekonomi, kesejahteraan dan kemandirian tercermin dari peningkatan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, antara lain dengan menurunnya angka pengangguran terbuka, meningkatnya pertumbuhan ekonomi serta penurunan angka kemiskinan.

c. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah.

Pemberdayaan masyarakat melalui pengembangan ekonomi lokal dalam rangka peningkatan kemampuan masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan pembangunan, budaya dan ekonomi. Melalui pemberdayaan ini masyarakat diarahkan untuk mengoptimalkan kemampuan baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki. Komitmen untuk pemberdayaan masyarakat ini akan didukung sepenuhnya oleh alokasi anggaran pembangunan yang berpihak pada masyarakat.



d. Pengembangan daerah terisolir

Terdapat komunitas adat terpencil (KAT) di wilayah Kabupaten Gorontalo diantaranya Desa Buhu Kecamatan Tibawa, Desa Pilomonu Kecamatan Mootilango, Desa Bululi Kecamatan Asparaga dan Desa Pangea Kecamatan Tolangohula.



Tabel : 3.1 (TC33)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFROMATIKA KABUPATEN GORONTALO
TAHUN 2023 DAN PERKIRAAN MAJU TAHUN 2024

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Perencanaan Tahun 2023				Perkiraan Maju Tahun 2024			Catatan Penting
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
02.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		100%	4.417.725.678		100%	3.907.700.495		
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Gorontalo	100 %	21.400.000		100 %	5.000.000		
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Gorontalo	4 dokumen	21.400.000	DAU	4 dokumen	5.000.000		
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kabupaten Gorontalo	100 %	3.334.927.527		100 %	2.975.241.395		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kabupaten Gorontalo	25 Orang/Bulan	3.105.967.527	DAU	25 orang	2.824.241.395		
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kabupaten Gorontalo	400 Dokumen	228.960.000	DAU	12 dokumen	151.000.000		
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kabupaten Gorontalo	100 %	672.638.151		12 laporan	494.309.100		
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Gorontalo	1 Paket	5.291.250	DAU	12 laporan	7.000.000		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kabupaten Gorontalo	2 Paket	55.700.000	DAU	12 laporan	120.000.000		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kabupaten Gorontalo	4 Paket	329.146.901	DAU	12 laporan	90.000.000		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kab/Kota Semua Kecamatan, Se,ua Kelurahan	250 Laporan	282.500.000	DAU	250 laporan	277.309.100		
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jas penunjang urusan pemerintah daerah sebagai Penunjang urusan pemerintah Daerah	Kabupaten Gorontalo	100 %	263.260.000		100 %	220.000.000		
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kabupaten Gorontalo	12 laporan	168.960.000	DAU	12 Laporan	150.000.000		
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kabupaten Gorontalo	3 laporan	18.300.000	DAU	3 Laporan	20.000.000		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kabupaten Gorontalo	12 laporan	76.000.000	DAU	12 Laporan	50.000.000		
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pemeliharaan Barang Milik daerah sebagai Penunjang urusan pemerintah Daerah	Kabupaten Gorontalo	100 %	125.500.000		100 %	213.150.000		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kabupaten Gorontalo	1 Unit	40.650.000	DAU	1 Unit	38.150.000		
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kabupaten Gorontalo	1 Unit	35.170.000	DAU	1 Unit	25.000.000		
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kabupaten Gorontalo	1 Unit	49.680.000	DAU	1 Unit	150.000.000		
02.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks persepsi publik terhadap pemerintah daerah		B (60) Indeks	811.162.320		100%	1.700.000.000		
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kabupaten Gorontalo	75 %	811.162.320		75 %	1.700.000.000		
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kabupaten Gorontalo	360 dokumen	633.000.000	DAU	360 dokumen	1.500.000.000		
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Kabupaten Gorontalo	1 Dokumen	32.700.000	DAU	1 Dokumen	50.000.000		
	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Kabupaten Gorontalo	25 Layanan	45.612.320	DAU	25 Layanan	75.000.000		
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Komunitas	Jumlah Dokumen Kermitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Kabupaten Gorontalo	19 Dokumen	99.850.000	DAU	19 Dokumen	75.000.000		



02.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase penerapan SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo		58,82%	322.657.658		64,71%	1.425.000.000		
	Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah domain pemerintah pusat dan sub domain pemerintah daerah yang dikelola dan terkoneksi dalam jaringan intra pemerintah daerah	Kabupaten Gorontalo	42	Domain/Sub Domain	222.522.523	DAU	75 %	1.050.000.000	
	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah domain / sub domain pemerintah daerah yang dikelola	Kabupaten Gorontalo	-		-	0	43 Domain/Sub Domain	50.000.000	
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Kabupaten Gorontalo	5	Unit	222.522.523	DAU	5 Unit	1.000.000.000	
	Pengelolaan E-government di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan publik dan administrasi yang terintegrasi	Kabupaten Gorontalo	1	Aplikasi/Layanan Publik	100.135.135	DAU	1	Aplikasi/Layanan Publik	375.000.000
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	Kabupaten Gorontalo	1	Unit	100.135.135	DAU	1 Unit	375.000.000	
02.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase tersedianya sistem pengelolaan statistik sektoral		20,59%	125.200.000		20,59%	240.000.000		
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terbangunnya satu data daerah	Kabupaten Gorontalo	50	%	125.200.000	DAU	50	%	240.000.000
	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	243	Orang	75.200.000	DAU	243 Orang	150.000.000	
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Kabupaten Gorontalo	1	Dokumen	50.000.000	DAU	1 Dokumen	90.000.000	
02.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah		23,53%	24.000.000		23,53%	100.000.000		
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Sistem informasi yang bersertifikat Elektronik	Kabupaten Gorontalo	23,53	%	24.000.000	DAU	23,53	%	100.000.000
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kabupaten Gorontalo	2	Laporan	24.000.000	DAU	2 Laporan	100.000.000	
T O T A L						5.700.745.656			7.372.700.495	



BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Perencanaan program dan kegiatan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo yang merupakan suatu proses penetapan serangkaian tindakan yang akan dilakukan dimasa yang akan datang dengan mengalokasikan segala sumber daya dalam rangka mencapai tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan-kegiatan yang sistematis dan terpadu guna mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan sesuatu yang harus dilaksanakan untuk merealisasikan program yang telah ditetapkan dan merupakan cerminan dari strategi konkrit untuk mencapai tujuan dan sasaran. Untuk dapat melaksanakan arah kebijakan yang sudah ditetapkan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo telah menyusun berbagai program dalam rangka meningkatkan pelayanan di urusan informasi dan komunikasi, dimana program tersebut mencakup kebijakan, mempertimbangkan sumber daya organisasi, terincikan sinkron dengan fungsi organisasi. Penjabaran dari program kerja ini dalam bentuk kegiatan, yang disusun secara tahunan untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan. Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan, baik kuantitatif maupun kualitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi, baik kinerja *input, proses, output, outcomes* maupun *impacts* sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.



Dalam rencana program dan kegiatan yang akan di laksanakan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo ada terdapat 5 (lima) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) sub kegiatan.

Adapun ke 5 (lima) program meliputi :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
2. Program Infromasi dan Komunikasi Publik
3. Program Aplikasi Informatika
4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral
5. Program Penyelenggaraan persandian untuk Pengamanan Informasi

Di dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan OPD Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Tahun 2022, penyusunan dokumen perencanaan tahun OPD tersebut itulah melalui tahapan-tahapan, yaitu:

1. Telah disusunnya Rencana Pembangunan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gorontalo Tahun 2021-2026
2. Telah dijabarkannya RPJMD Kabupaten Gorontalo Tahun 2021-2026 kedalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan inforamtika Kabupaten Gorontalo Tahun 2016-2021
3. Telah disusunnya Rencana Kerja Pemerintah Kabupaten Gorontalo Tahun 2022 berdasarkan Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 16 Tahun 2021.

Adapun program/kegiatan dan pendanaan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gorontalo Tahun 2022 secara lebih rinci dituangkan dalam tabel 4.1



Tabel : 4.1

**PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN GORONTALO
TAHUN 2023**

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Perencanaan Tahun 2023				
			Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	5	6	7	8	9
02.16.01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Aparatur	Kabupaten Gorontalo	100%	4.417.725.678,00	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Aparatur	Kabupaten Gorontalo	100 %	21.400.000,00	DAU
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Aparatur	Kabupaten Gorontalo	4 Dok	21.400.000,00	DAU
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Aparatur	Kabupaten Gorontalo	100 %	3.334.927.527,00	DAU
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Aparatur	Kabupaten Gorontalo	25 Orang/Bulan	3.105.967.527,00	DAU
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Aparatur	Kabupaten Gorontalo	400 Dok	228.960.000,00	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Aparatur	Kabupaten Gorontalo	100 %	672.638.151,00	DAU
Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Perencanaan Tahun 2023				
1	2	3	5	6	7	8	9
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Aparatur	Kabupaten Gorontalo	1 Paket	5.291.250,00	DAU
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Aparatur	Kabupaten Gorontalo	2 Paket	55.700.000,00	DAU
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Aparatur	Kabupaten Gorontalo	4 Paket	329.146.901,00	DAU
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Aparatur	Kabupaten Gorontalo	250 Lap	282.500.000,00	DAU
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jas penunjang urusan pemerintah daerah sebagai Penunjang urusan pemerintah Daerah	Aparatur	Kabupaten Gorontalo	100 %	263.260.000,00	DAU
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Aparatur	Kabupaten Gorontalo	12 Lap	168.960.000,00	DAU
	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Aparatur	Kabupaten Gorontalo	3 Lap	18.300.000,00	DAU
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Aparatur	Kabupaten Gorontalo	12 Lap	76.000.000,00	DAU



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Perencanaan Tahun 2023				
			Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	5	6	7	8	9
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Jas penunjang urusan pemerintah daerah sebagai Penunjang urusan pemerintah Daerah	Aparatur	Kabupaten Gorontalo	100 %	125.500.000,00	DAU
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Aparatur	Kabupaten Gorontalo	1 Unit	40.650.000,00	DAU
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Aparatur	Kabupaten Gorontalo	1 Unit	35.170.000,00	DAU
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Aparatur	Kabupaten Gorontalo	1 Unit	49.680.000,00	DAU
02.16.02	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Indeks persepsi publik terhadap pemerintah daerah	Masyarakat	Kabupaten Gorontalo	B(60) Indeks	811.162.320,00	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Masyarakat	Kabupaten Gorontalo	75 %	811.162.320,00	DAU
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Masyarakat	Kabupaten Gorontalo	360 Dok	633.000.000,00	DAU

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Perencanaan Tahun 2023				
			Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	5	6	7	8	9
	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Masyarakat	Kabupaten Gorontalo	1 Dok	32.700.000,00	DAU
	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media	Masyarakat	Kabupaten Gorontalo	25 Layanan	45.612.320,00	DAU
	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media dan Komunitas dalam Mendiseminasikan Informasi Program atau Kebijakan	Masyarakat	Kabupaten Gorontalo	19 Dok	99.850.000,00	DAU
02.16.03	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase penerapan SPBE di Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo	OPD	Kabupaten Gorontalo	58,82%	322.657.658,00	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	OPD	Kabupaten Gorontalo	42 Domain/ Sub Domain	222.522.523,00	DAU
	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	OPD	Kabupaten Gorontalo	5 Unit	222.522.523,00	DAU
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan publik dan administrasi yang terintegrasi	OPD	Kabupaten Gorontalo	1 Aplikasi/ Layanan Publik	100.135.135,00	DAU



Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Perencanaan Tahun 2023				
			Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	5	6	7	8	9
	Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektronik yang Dikembangkan	OPD	Kabupaten Gorontalo	1 Unit	100.135.135,00	DAU
02.20.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase tersedianya sistem pengelolaan statistik sektoral	OPD	Kabupaten Gorontalo	20,59%	125.200.000,00	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	OPD	Kabupaten Gorontalo	Domain/ 42 Sub Domain	125.200.000,00	DAU
	Peningkatan Kapasitas SDM Pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Aparatur	Kab. Gorontalo, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	243 Orang	75.200.000,00	DAU
	Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	OPD	Kabupaten Gorontalo	1 Dok	50.000.000,00	DAU
02.21.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah	OPD	Kabupaten Gorontalo	23,53%	24.000.000,00	

Kode	Urusan / Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Out Comes) / Kegiatan (Output)	Perencanaan Tahun 2023				
			Kelompok Sasaran	Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana
1	2	3	5	6	7	8	9
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jumlah Sistem informasi yang bersertifikat Elektronik	OPD	Kabupaten Gorontalo	23,53 %	24.000.000,00	
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	OPD	Kabupaten Gorontalo	2 Laporan	24.000.000,00	
TOTAL						5.700.745.656,00	

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten gorontalo Tahun 2023 disusun sesuai dengan target kinerja yang ingin dicapai. Ketersediaan anggaran menjadi salah satu kunci untuk mewujudkan renja yang sesuai dengan kebutuhan. Jika ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan renja maka diperlukan penyesuaian seperti pengurangan subkegiatan yang memiliki prioritas paling sedikit dalam mendukung target IKU maupun IKK. Selain itu juga dapat dilakukan dengan penyesuaian target output kegiatan akan tetapi tetap mempertimbangan capaian target IKU maupun IKK tahunan dalam renstra.

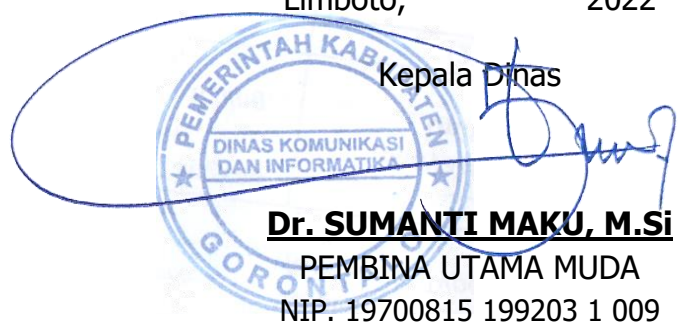
Untuk pelaksanaan renja diperlukan beberapa kaidah yaitu seluruh unsur perangkat daerah dan stakeholder terkait harus melaksanakan rencana yang sudah ditetapkan dengan sebaik-baiknya. Setiap unsur perangkat daerah harus senantiasa melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana yang sudah ditetapkan. Diperlukan juga koordinasi yang baik antar unsur perangkat daerah untuk menyukseskan pelaksanaan renja 2023.

Rencana tindak lanjut yang perlu dilakukan kedepan antara lain:

1. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang ada untuk melaksanakan kegiatan sesuai target yang ditetapkan;
2. Memperkuat koordinasi antar unsur perangkat daerah dan stakeholder;
3. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala melalui kunjungan lapangan, pembuatan laporan, rapat koordinasi berkala, pendampingan teknis, dll;
4. Menyusun dan melaksanakan standar operasional prosedur kegiatan;
5. Memberikan reward & punishment yang berkeadilan sesuai dengan performa masing- masing.

Limboto, 2022

Kepala Dinas


Dr. SUMANTI MAKU, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19700815 199203 1 009

LAMPIRAN



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Abudi Ilahude No.090 Kel. Kayubulan Kec. Limboto Kode Pos 96211
Website : <http://gorontalokab.go.id> Email : diskominfo.gorontalokab@gmail.com

(GENDER BUDGET STATEMENT)

SKPD : DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

TAHUN ANGGARAN : 2023

PROGRAM	Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	
KEGIATAN	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
KODEKEGIATAN	2.20.02.2.01	
ANALISIS SITUASI	<p>Data sektoral merupakan implementasi perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang merupakan program nasional yang harus diterapkan di setiap daerah. Sehingga tahun 2022 kabupaten Gorontalo telah menerbitkan peraturan bupati nomor 29 tahun 2022 tentang satu data kabupaten Gorontalo. Untuk mendukung perbup tersebut kominfo sebagai wali data nasional di daerah melakukan kegiatan dalam rangka mendukung implementasi Perpres 39 tahun 2019 dengan indikator yang digunakan adalah Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya sehingga Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi terpenuhi dengan target setiap tahunnya sebanyak 205 orang. pada tahun 2022 Dengan total anggaran Rp. 50.000.000 kominfo berusaha untuk tetap melakukan kegiatan ini walaupun keterbatasan anggaran. Tanpa disadari program/kegiatan ini sebenarnya sangatlah penting dalam mendukung perencanaan dan penganggaran di daerah sehingga perlu dukungan penuh baik dari segi anggaran dan pelaksanaan dilapangan dan kominfo menargetkan bahwa data di kabupaten Gorontalo bersumber pada satu sistem data dan dapat digunakan oleh pimpinan daerah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat kabupaten Gorontalo.</p>	
RENCANA TINDAK	Kegiatan	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
	Tujuan	<ul style="list-style-type: none">- Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi- Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun
	Aktivitas	<ul style="list-style-type: none">- Membuat uraian kerja dengan memasukkan kepesertaan peningkatan mutu statistik berdasarkan gender- Satu Data Kabupaten Gorontalo berbasis gender

	Sumber daya (Inputs)	Anggaran dalam Dokumen RKASKPD Peserta/Dokumen
		205 desa dan 60 OPD
	Output	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Kapasitas SDM dan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi • Jumlah data yang terhimpun dan terpilah gender

ALOKASI SUMBER DAYA	Anggaran SDM	Rp.75.200.000,- Panitia Peserta : 205 Desa dan 60 OPD
	Peralatan dan Mesin	Komputer, printer, ATK
	OUTCOMES	<u>Rumusan Kinerja Outcome:</u> Meningkatnya kualitas SDM pengelola statistik sektoral <u>Indikator Kinerja Outcome:</u> Persentase tersedianya system pengelolaan statistic sektoral

Limboto, 12 Juli 2022

KEPALA DINAS



Dr. SUMANTI MAKU, M.Si
NIP.19700815 199203 1 009



PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO

DINASKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jln. Abudi Ilahude No.090 Kel. Kayubulan Kec. Limboto Kode Pos 96211
Website ; <http://gorontalokab.go.id> Email : diskominfo.gorontalokab@gmail.com

MATRIKS LEMBAR KERJA GENDER ANALYSIS PATHWAY(GAP)

SKPD	Dinas Komunikasi Dan Informatika
Program	Program Penyelenggaran Statistik Sektoral
Kegiatan	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota
ANALISIS SITUASI	<p>Data pembuka wawasan(Data Pilah Gender) Data sektoral merupakan implementasi perpres nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia, yang merupakan program nasional yang harus diterapkan disetiap daerah. Sehingga tahun 2022 kabupaten Gorontalo telah menerbitkan peraturan bupati nomor 29 tahun 2022 tentang satu data kabupaten Gorontalo. Untuk mendukung perbup tersebut kominfo sebagai wali data nasional didaerah melakukan kegiatan dalam rangka mendukung implementasi Perpres 39 tahun 2019 dengan indicator yang digunakan adalah Jumlah SDM yang Meningkatkan Kapasitasnya sehingga Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi terpenuhi dengan target setiap tahunnya sebanyak 205 orang. pada tahun 2022 Dengan total anggaran Rp. 50.000.000 kominfo berusaha untuk tetap melakukan kegiatan ini walaupun keterbatasan anggaran. Tanpa disadari program/kegiatan ini sebenarnya sangatlah penting dalam mendukung perencanaan dan penganggaran di daerah sehingga perlu dukungan penuh baik dari segi anggaran dan pelaksanaan dilapangan dan kominfo menargetkan bahwa data di kabupaten Gorontalo bersumber pada satu sistem data dan dapat digunakan oleh pimpinan daerah dalam pengambilan keputusan untuk kepentingan masyarakat kabupaten Gorontalo.</p>
KESENJANGAN & PERMASALAHAN GENDER	<p>Proses Analisis</p> <ol style="list-style-type: none">1. Masih banyak data-data di daerah yang tidak terpilah2. Proses perencanaan belum menggunakan sistem Satu Data Kabupaten Gorontalo berbasis gender

<p>PENYEBAB INTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">Proses Analisis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Masih banyak SDM pengelola data sektoral belum memahami pentingnya data, baik laki - laki dan perempuan - Data yang tersedia belum termanajemen dengan baik dan belum terintegrasi
<p>PENEYEBAB EKSTERNAL</p>	<p style="text-align: center;">Proses Analisis</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kemauan dari masing - masing pengelola data untuk mengelola data - Intervensi masing - masing pimpinan siapa yang akan dipilih untuk mengelola data
<p>REFORMULASI TUJUAN</p>	<p>RENJA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kualitas SDM dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi - Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun untuk pemenuhan satu data kabupaten gorontalo yang berbasis data terpilah
<p>RENCANA AKSI</p>	<p style="text-align: center;">RENJA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengikut sertakan operator data untuk mnegikuti bimtek data sektoral - Pemenuhan data sektoral dimasing - masing OPD.
<p>DATA PIJAKAN AWAL</p>	<p>Kombinasi Data Renja dan Data Gender</p> <ul style="list-style-type: none"> - 205 Operator Data (2021) - 205 Operator Data (2022) - Operator data setidaknya harus terwakili baik perempuan atau laki - laki dengan melihat kemauanya. - 4 OPD menyampaikan permintaan data sektoral pada sistem satu data kabupaten gorontalo.
<p>PENETAPAN INDIKATOR GENDER</p>	<p style="text-align: center;">RENJA</p> <ul style="list-style-type: none"> - Menargetkan bahwa pengelola data tidak harus dilihat dari gender namun pada kemauan dan kualitas SDMnya.

Limboto, 12 Juli 2022

KEPALADINAS



Dr. SUMANTI MAKU, M.Si

NIP.19700815 199203 1 009

